

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negeri berdaulat dan berkomitmen memberi pengakuan yang sama untuk tiap warganya, baik perempuan ataupun laki-laki, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Yakub, Tamma, & Yunus, 2024). Dalam ranah politik khususnya di legislatif, partisipasi perempuan menjadi salah satu indikator penting terciptanya demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Indonesia telah mengadopsi kebijakan afirmatif, seperti penerapan kuota 30% bagi perempuan dalam daftar calon legislatif pada pemilu. Dengan kehadiran perempuan di posisi strategis, diharapkan proses perumusan kebijakan lebih mencerminkan perspektif inklusif yang mencakup kepentingan perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di legislatif masih sangat rendah dibandingkan dengan partisipasi laki-laki. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 mengenai data indeks ketimpangan gender yang dimana data tersebut menunjukkan bahwa persentase anggota legislatif perempuan dan laki-laki sangat timpang yang dimana persentase perempuan sebanyak 21,74% dan persentase laki-laki sebanyak 78,26%.

Kondisi ini tidak terlepas dari budaya patriarki dan stereotip gender yang masih mengakar kuat di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Polewali Mandar. Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar masih memegang teguh budaya sibaliparri yang dimana budaya ini merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat suku mandar yang dipahami bahwa dalam berumah tangga, segala sesuatu harus ditanggung bersama, Namun prakteknya masih sangat patriarki karena segala urusan domestik sepenuhnya dibebankan kepada perempuan (istri). Di satu sisi sibaliparri memberikan ruang kesetaraan di wilayah kerja ekonomis, di sisi lain budaya patriarki menutup rapat ruang kesetaraan di wilayah kerja domestik. Sehingga perempuan Mandar memikul beban ganda dan harus bekerja rangkap, selain bekerja membantu suami, dia juga harus mengurus anak dan mengurus rumah (mencuci, memasak, menyapu, dll). Hal ini telah dibahas dalam buku yang berjudul "Belajar dari perempuan Mandar" yang mengkaji budaya sibaliparri dalam masyarakat mandar.

Konsekuensi dari budaya patriarki dan stereotip gender yang masih kuat dalam masyarakat Polewali Mandar ini tentunya berdampak pada keterlibatan perempuan dalam pemilihan legislatif. Para perempuan masih dipandang warga kelas dua yang tidak berhak untuk ikut mengambil keputusan-keputusan publik. Perempuan tetaplah subordinat laki-laki dimana segala sikap dan keputusan sepenuhnya diserahkan kepada laki-laki (suami).

Peran perempuan dianggap terbatas pada ranah domestik, sehingga partisipasi politik mereka cenderung dipandang sebelah mata.

Dampak dari kondisi ini terlihat jelas pada keterwakilan perempuan di legislatif Kabupaten Polewali Mandar.

**Tabel 1. Jumlah Perempuan Terpilih pada Pemilu DPRD Kabupaten Polewali Mandar periode 2014, 2019, dan 2024**

Pemilu 2014	Pemilu 2019	Pemilu 2024
9 Orang	8 Orang	7 Orang
<b>Total 20% dari Jumlah Kursi</b>	<b>Total 20% dari Jumlah Kursi</b>	<b>Total 17% dari Jumlah Kursi</b>

*Sumber : KPU Polewali Mandar*

Berdasarkan tabel diatas, jumlah perempuan yang terpilih pada pemilihan legislatif di Kabupaten Polewali Mandar mengalami tren penurunan dari pemilu 2014 hingga pemilu 2024. Penurunan ini, meskipun tidak signifikan secara angka, menandakan lemahnya upaya untuk memenuhi kuota 30% sebagaimana diamanatkan. Penurunan keterwakilan perempuan dalam legislatif di Kabupaten Polewali Mandar ini mencerminkan masih kuatnya hambatan sosial yang menghalangi partisipasi mereka dalam dunia politik. Norma dan budaya patriarki yang masih kental yang menempatkan perempuan pada peran domestik serta anggapan bahwa politik adalah ranah laki-laki menjadi faktor utama yang membatasi peluang perempuan untuk terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan.

Salah satu indikasi nyata dari tantangan keterwakilan perempuan di legislatif ini dapat dilihat pada distribusi perwakilan di setiap daerah pemilihan (DAPIL) di Kabupaten Polewali Mandar.

**Tabel 2. Distribusi jumlah perempuan terpilih pada setiap Dapil di Kabupaten Polewali Mandar pada Pemilu 2019 dan 2024**

Dapil di Kabupaten Polewali Mandar	Jumlah perempuan terpilih pada pemilu 2019	Jumlah perempuan terpilih pada pemilu 2024
Dapil 1 ( Polewali, Binuang )	-	-
Dapil 2 ( Tinambung, Balanipa, Limboro, Alu )	-	1 Orang
Dapil 3 ( Campalagian, Luyo, Tubbi Taramanu )	3 Orang	2 Orang
Dapil 4 ( Wonomulyo, Mapilli, Bulo )	2 Orang	2 Orang
Dapil 5 ( Matakali, Tapango, Anreapi, Matangnga )	3 Orang	2 Orang
<b>Total</b>	<b>8 Orang</b>	<b>7 Orang</b>

*Sumber : Rekap Suara KPU pada Pemilu 2019 dan 2024 Polewali Mandar*

Berdasarkan tabel diatas, DAPIL 1 belum mampu mengirimkan wakil perempuan ke legislatif selama dua pemilu berturut-turut, baik pada tahun 2019 maupun 2024, padahal dapil 1 merupakan dapil dengan jumlah calon legislatif perempuan terbanyak pada pemilu DPRD 2024 di Polewali Mandar. Kegagalan perempuan di DAPIL 1 untuk memperoleh kursi legislatif selama dua pemilu berturut-turut mencerminkan dinamika sosial dan budaya yang kompleks yang perlu dikaji lebih dalam. Persepsi konservatif masyarakat terhadap peran perempuan dalam ruang publik, termasuk dalam politik, dapat menghalangi peluang mereka untuk mendapatkan dukungan elektoral yang signifikan. Berbeda dengan DAPIL lainnya yang setidaknya berhasil mengirimkan beberapa perempuan ke legislatif, DAPIL 1 menjadi anomali yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

Untuk memahami fenomena ini lebih mendalam, penelitian ini akan memfokuskan subjek penelitian tentang persepsi masyarakat pada DAPIL 1 untuk mengukur pemahaman masyarakat tentang keterlibatan perempuan pada pemilihan legislatif, khususnya di Kecamatan Polewali, untuk melihat intensitas kecenderungan alasan masyarakat mengenai keterlibatan perempuan pada pemilihan legislatif. Kecamatan Polewali dipilih sebagai lokasi penelitian dengan sejumlah alasan strategis. Pertama, Kecamatan Polewali memiliki jumlah pemilih yang terbesar di Dapil 1, serta keragaman sosial dan budaya yang merepresentasikan karakteristik masyarakat Kabupaten Polewali Mandar secara umum. Hal ini menjadikan Polewali sebagai lokasi yang relevan untuk mengamati persepsi masyarakat terhadap keterlibatan perempuan dalam pemilihan legislatif. Kedua, Kecamatan Polewali merupakan pusat ekonomi dan pemerintahan di Dapil 1, yang menjadikannya arena persaingan politik yang lebih ketat dibandingkan kecamatan lainnya. Sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan, interaksi antara faktor sosial, ekonomi, dan politik di Polewali memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil pemilu. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk memahami bagaimana persepsi masyarakat, termasuk stereotip gender dan ekspektasi sosial, memengaruhi peluang keterpilihan perempuan sebagai anggota legislatif. Dengan menitikberatkan penelitian pada Kecamatan Polewali, diharapkan dapat diungkap secara mendalam pola dominasi politik laki-laki dan bagaimana persepsi masyarakat berkontribusi terhadap kesenjangan keterpilihan perempuan.

Persepsi masyarakat terhadap keterlibatan perempuan di ranah politik telah menjadi topik yang menarik perhatian sejumlah peneliti. Dua penelitian yang relevan dalam konteks ini adalah karya Fariaty (2021), yang berjudul *Keterwakilan Perempuan Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar*, serta penelitian Adi et al. (2022) yang membahas *Persepsi Masyarakat Terhadap Perempuan di Ranah Politik Lokal Kabupaten Bulukumba*. Penelitian Fariaty (2021) lebih menyoroti keterwakilan perempuan di DPRD serta faktor internal dan eksternal yang memengaruhi partisipasi politik mereka. Namun, penelitian ini belum mendalami bagaimana masyarakat

Kabupaten Polewali Mandar secara keseluruhan memandang peran perempuan di ranah politik. Sementara itu, penelitian Adi et al. (2022) menekankan pada persepsi kelompok tertentu, seperti anggota KPUD, perempuan di DPRD, tokoh masyarakat, dan pemilih pemula. Namun, studi ini memiliki keterbatasan karena tidak melibatkan kelompok informan yang lebih beragam, seperti aktivis perempuan lokal, tokoh adat, atau masyarakat umum yang tidak aktif secara politik. Akibatnya, gambaran persepsi masyarakat menjadi kurang representatif. Dengan memperhatikan kekurangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi masyarakat Kabupaten Polewali Mandar terhadap keterlibatan perempuan dalam politik secara lebih komprehensif.

Dalam memahami bagaimana persepsi masyarakat tentang keterlibatan perempuan dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Polewali Mandar, teori persepsi konstruktif memiliki relevansi yang kuat. Teori ini menjelaskan bahwa cara seseorang melihat suatu fenomena tidak hanya bergantung pada rangsangan dari luar, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman, nilai-nilai, serta pengetahuan yang telah tertanam sebelumnya. Dengan kata lain, masyarakat tidak sekadar menerima informasi begitu saja, melainkan mengolah dan menafsirkannya berdasarkan latar belakang sosial dan budaya yang mereka miliki. Dalam konteks keterlibatan perempuan di pemilihan legislatif, berbagai faktor seperti tradisi adat, ajaran agama, tingkat pendidikan, serta keterpaparan terhadap figur-figur perempuan di politik berperan dalam membentuk opini publik, baik yang bersifat mendukung maupun menolak. Oleh karena itu, persepsi masyarakat mengenai perempuan dalam pemilihan legislatif di Polewali Mandar bersifat dinamis dan terbentuk melalui proses sosial yang berlangsung terus-menerus seiring dengan perubahan sosial dan politik di wilayah tersebut.

Penelitian ini memiliki nilai teoritis yang penting karena memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai keterlibatan perempuan dalam dunia politik dengan menggunakan perspektif teori persepsi konstruktif. Teori ini menegaskan bahwa cara individu memandang suatu fenomena, termasuk peran perempuan dalam politik, bukanlah sesuatu yang terbentuk secara pasif, melainkan melalui proses interpretasi yang dipengaruhi oleh pengalaman, nilai-nilai, serta faktor sosial dan budaya di sekelilingnya. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan, organisasi politik, dan masyarakat dalam menyusun strategi yang lebih efektif guna meningkatkan partisipasi perempuan dalam legislatif. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait hal tersebut dengan judul **“PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KETERLIBATAN PEREMPUAN DI RANAH POLITIK KABUPATEN POLEWALI MANDAR”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana uraian yang telah disampaikan diatas dan berdasarkan latar belakang masalah dan luasnya cakupan judul, maka penulis membatasi dengan rumusan masalah :

“Bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Polewali tentang keterlibatan perempuan pada pemilihan legislatif di Kabupaten Polewali Mandar?”

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat terkait dengan keterlibatan perempuan di pemilihan legislatif, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

“Untuk mendeskripsikan pemahaman dan pengetahuan masyarakat Kecamatan Polewali tentang keterlibatan perempuan pada pemilihan legislatif di Kabupaten Polewali Mandar”

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu sosial, terutama yang berkaitan dengan politik dan gender. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dalam kajian literatur mengenai pandangan masyarakat terhadap peran perempuan di dunia politik, khususnya di legislatif serta memberikan perspektif baru tentang dinamika politik berbasis gender di Kabupaten Polewali Mandar.
2. Secara praktis, Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah, organisasi politik, dan lembaga masyarakat dalam merancang strategi yang lebih inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam legislatif. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi para perempuan yang tertarik untuk berpartisipasi dalam dunia politik agar lebih memahami persepsi publik dan tantangan ada.

## 1.4 Tinjauan Pustaka

### 1.4.1 Keterlibatan Perempuan dalam Ranah Politik

Keterlibatan perempuan dalam ranah politik merupakan bentuk partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan publik. Partisipasi ini mencakup berbagai kegiatan, seperti menjadi anggota parlemen, menduduki jabatan di lembaga pemerintahan, atau terlibat dalam perumusan kebijakan di tingkat lokal maupun nasional. Keterlibatan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan, kepentingan, dan perspektif perempuan dapat terwakili secara setara dalam proses pengambilan keputusan. Namun, partisipasi perempuan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama karena pengaruh budaya patriarki yang mengakar, yang sering kali membatasi perempuan untuk mencapai kesetaraan gender di bidang politik (Nursyifa, dkk., 2023).

Secara hukum, hak perempuan untuk terlibat dalam politik di Indonesia dijamin oleh berbagai regulasi. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam politik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Selain itu, Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mewajibkan partai politik untuk memenuhi kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusannya, sebagai upaya afirmatif untuk mendorong kesetaraan gender. Di tingkat internasional, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, yang memperkuat komitmen negara dalam menghapus diskriminasi terhadap perempuan di berbagai bidang, termasuk politik. Partisipasi perempuan dalam politik tidak hanya merupakan hak, tetapi juga memiliki signifikansi besar untuk menciptakan demokrasi yang inklusif. Dengan terlibatnya perempuan dalam politik, representasi kebutuhan dan perspektif perempuan dalam kebijakan publik menjadi lebih terjamin. Hal ini penting untuk menciptakan kebijakan yang adil dan responsif terhadap semua kelompok masyarakat. Selain itu, keterlibatan perempuan juga berkontribusi pada penguatan kesetaraan gender, yang pada akhirnya dapat mengurangi stereotip dan diskriminasi yang masih sering dialami perempuan di masyarakat. Untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik, kebijakan afirmatif seperti kuota 30% perempuan di lembaga legislatif telah diterapkan. Kuota ini bertujuan untuk memberikan peluang lebih besar bagi perempuan untuk masuk ke dalam arena politik yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi kendala, seperti kurangnya komitmen dari partai politik untuk mematuhi aturan tersebut. Meski demikian, kebijakan ini tetap menjadi langkah awal yang penting dalam mendorong perempuan untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses politik (Setiyawan, dkk., 2023).

Selain meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan, kebijakan afirmatif juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif. Dengan adanya perempuan di posisi pengambilan keputusan, diharapkan kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan cenderung lebih fokus pada isu-isu sosial, kesehatan, dan pendidikan yaitu isu-isu yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam politik dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Dalam aspek demokrasi yang inklusif, partisipasi perempuan menjadi elemen yang tidak bisa diabaikan. Demokrasi yang baik adalah demokrasi yang mampu mewakili semua elemen masyarakat, termasuk perempuan. Oleh

karena itu, memastikan keterlibatan perempuan dalam politik bukan hanya soal memenuhi hak seseorang, tetapi juga tentang menciptakan pemerintahan yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat. Dengan dukungan regulasi yang ada, partisipasi perempuan dalam politik diharapkan terus meningkat, sehingga dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara (Amanah, Nurbayani, Komariah, & Nugraha, 2023).

#### **1.4.2 Teori Persepsi Konstruktif**

Teori persepsi konstruktif yang dikembangkan oleh Jerome Bruner dan Richard Gregory menjelaskan bahwa persepsi merupakan proses aktif, di mana individu tidak sekadar menerima rangsangan dari lingkungan secara langsung, melainkan menafsirkan dan membentuk makna berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan keyakinan yang telah dimiliki sebelumnya. Bruner menyoroti peran penting dari proses kategorisasi dalam memahami lingkungan, sedangkan Gregory menekankan bahwa persepsi melibatkan pembentukan hipotesis dan penggunaan model mental. Teori ini menggali atau menganalisa berdasarkan alat indra, sehingga memicu adanya persepsi atau tanggapan baik bersifat positif atau negative. Teori ini juga mengemukakan bahwa individu menafsir dan bertindak menurut kategori konseptual yang ada dalam pikiran atau sesuatu yang diterima oleh rangsangan alat indra. Teori persepsi konstruktif disusun berdasarkan anggapan bahwa selama proses persepsi akan ada kemungkinan atau hipotesis yang digambarkan oleh pikiran seseorang dalam menerima rangsangan dari alat indra. Dengan demikian, persepsi pada penelitian ini merupakan sebuah efek kombinasi dari informasi yang diterima berupa informasi, pengalaman, dan pengetahuan yang dipelajari tentang dunia yang didapatkan dari pengalaman (Purwa & Suksmawati, 2022).

Teori Persepsi Konstruktif menjelaskan bahwa cara seseorang memandang sesuatu dipengaruhi oleh pengalaman hidup, nilai-nilai yang dianut, serta lingkungan sosial di sekitarnya. Dalam hal ini, pandangan masyarakat tentang partisipasi perempuan dalam politik tidak terbentuk secara instan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti adat istiadat, tingkat pendidikan, dan sejarah peran gender di daerah tersebut. Di Polewali Mandar, persepsi masyarakat terhadap peran perempuan kemungkinan besar dibentuk oleh tradisi dan norma lokal yang berlaku.

Jika budaya setempat lebih banyak menempatkan perempuan pada ranah domestik, maka pandangan terhadap keterlibatan mereka di dunia politik mungkin cenderung terbatas atau kurang mendukung. Namun, jika terjadi perubahan dalam masyarakat, misalnya melalui peningkatan akses pendidikan atau kampanye kesetaraan gender,

persepsi tersebut dapat bergeser ke arah yang lebih positif. Teori ini menegaskan bahwa persepsi masyarakat bersifat dinamis dan terus berubah seiring dengan interaksi antara individu, lingkungan, dan perkembangan sosial. Analisis ini akan mengungkap bagaimana konstruksi persepsi tersebut memengaruhi tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap calon legislatif perempuan, serta implikasinya terhadap partisipasi politik perempuan di Polewali Mandar.

### **1.4.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu tentang partisipasi politik perempuan telah banyak dilakukan, terutama mengenai efektivitas kebijakan kuota perempuan di Indonesia. Kebijakan ini yang menetapkan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar calon legislatif, bertujuan untuk membuka peluang lebih besar bagi perempuan dalam ranah politik. Namun efektivitas implementasi nya masih menjadi tantangan. Misalnya, di Polewali Mandar, meskipun terjadi peningkatan jumlah perempuan di DPRD, keterwakilan tersebut masih fluktuatif. Hambatan struktural seperti budaya patriarki dan persepsi negatif masyarakat terhadap perempuan dalam politik menjadi penghalang utama (Fariaty, 2021). Demikian pula di Bulukumba, meskipun kuota terpenuhi, banyak perempuan politisi yang menghadapi keraguan terkait kemampuan seseorang akibat norma tradisional yang kuat (Adi, Sari Handayani Razak, & Kurniawan, 2022). Dalam faktor pendukung, peran partai politik sangat signifikan. Partai-partai yang mendukung kader perempuan melalui pendidikan politik dan pemberian posisi strategis membantu memperkuat keberadaan perempuan dalam politik. Selain itu, modal sosial dan ekonomi yang dimiliki perempuan juga memberikan seseorang kesempatan untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses politik. Faktor-faktor ini memungkinkan perempuan untuk mengatasi sebagian hambatan yang ada dan memberikan kontribusi nyata dalam ranah politik (Fariaty, 2021).

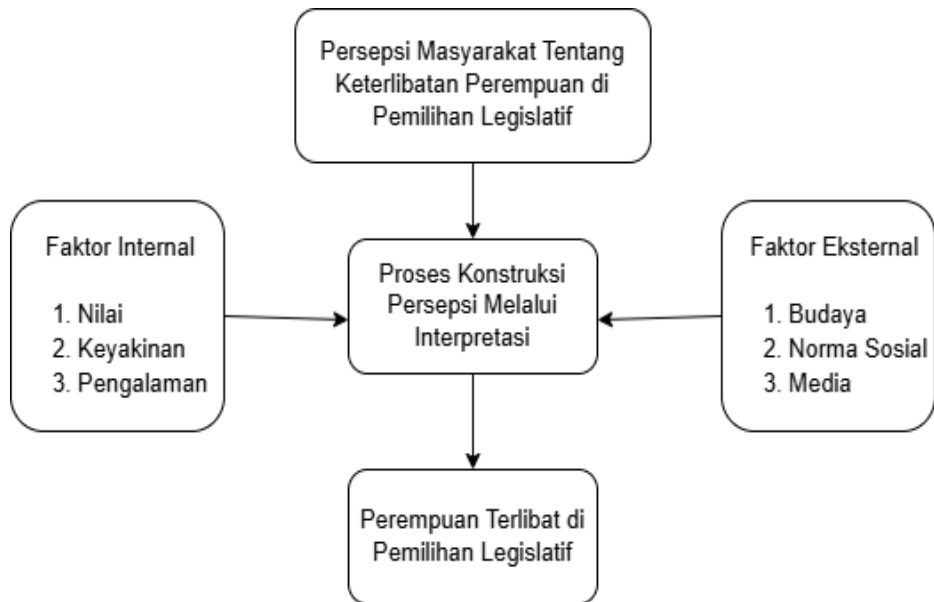
Akan tetapi, berbagai hambatan tetap menjadi tantangan yang serius. Salah satu penghambat utama adalah stereotip gender yang menganggap politik sebagai dunia laki-laki. Persepsi ini menciptakan stigma dan mengurangi kepercayaan diri perempuan untuk aktif dalam politik. Selain itu, dukungan dari lingkungan, baik keluarga maupun masyarakat, sering kali masih minim. Dukungan ini sangat penting karena perempuan kerap menghadapi tekanan sosial yang mendorong seseorang untuk tetap berada dalam peran tradisional sebagai pengurus rumah tangga (Adi et al., 2022). Studi kasus keterlibatan perempuan dalam politik di berbagai daerah juga menunjukkan hasil yang beragam. Di beberapa daerah, perempuan mendapatkan dukungan untuk berpartisipasi, tetapi masih harus menghadapi tantangan dari norma

sosial yang membatasi ruang gerak seseorang. Misalnya, di beberapa provinsi di Indonesia, meskipun kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender meningkat, banyak perempuan yang belum berani mengambil peran politik karena kekhawatiran akan stigma dan tekanan sosial (Fariaty, 2021).

Persepsi masyarakat terhadap perempuan dalam politik juga menjadi variabel penting yang memengaruhi tingkat partisipasi. Persepsi yang positif dapat mendorong lebih banyak perempuan untuk terlibat aktif dalam politik, sementara persepsi yang negatif, seperti pandangan patriarkal yang kuat, menjadi penghalang utama. Misalnya, di Bulukumba, meskipun masyarakat mulai menerima gagasan perempuan dalam politik, keraguan terhadap kemampuan perempuan masih sering muncul. Persepsi ini tidak hanya memengaruhi kepercayaan diri perempuan tetapi juga menentukan sejauh mana seseorang dapat memperoleh dukungan dari masyarakat luas (Adi et al., 2022). Berdasarkan analisis terhadap penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun kebijakan kuota perempuan memberikan peluang, efektivitasnya sangat bergantung pada konteks sosial dan budaya, peran partai politik, serta persepsi masyarakat. Dengan mengatasi stereotip gender dan meningkatkan dukungan dari berbagai pihak, partisipasi perempuan dalam politik dapat lebih ditingkatkan. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat demokrasi, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan perspektif yang lebih inklusif dan beragam.

#### **1.4.4 Skema Penelitian**

Skema penelitian ini menjelaskan kerangka pemikiran mengenai bagaimana masyarakat memandang keterlibatan perempuan dalam pemilihan legislatif. Faktor-faktor internal, seperti nilai-nilai yang dianut, keyakinan, dan pengalaman pribadi, berperan dalam membentuk persepsi melalui proses interpretasi. Di sisi lain, faktor eksternal, termasuk budaya, norma sosial, dan pengaruh media, juga turut membentuk pandangan tersebut. Hasilnya adalah gambaran tentang bagaimana persepsi masyarakat memengaruhi partisipasi perempuan dalam legislatif.

**Gambar 1. Skema Penelitian**

## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

#### **2.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar, tepatnya di Kecamatan Polewali.

#### **2.2 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Agus Rustamana, Rohmah, Natasya, & Raihan, 2024). Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena atau permasalahan sosial dengan menitikberatkan pada sudut pandang serta pengalaman langsung dari individu atau kelompok yang terlibat dan tidak melibatkan prosedur statistik atau perhitungan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menganalisis bagaimana masyarakat memandang keterlibatan perempuan dalam ranah politik di Kabupaten Polewali Mandar, termasuk berbagai faktor yang memengaruhi pandangan tersebut. Tujuannya adalah untuk memahami cara berpikir, sikap, dan dinamika sosial yang membentuk persepsi masyarakat, sehingga dapat menjadi dasar yang kuat untuk merumuskan kebijakan atau langkah strategis yang sesuai.

#### **2.3 Sumber Data**

Sumber data adalah segala sesuatu yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi untuk mendukung penelitian mereka. Dalam penelitian kualitatif, sumber data sangat penting untuk memberikan gambaran mendalam dan kontekstual tentang fenomena. Berikut adalah sumber data dalam penelitian ini, yaitu :

##### **2.3.1 Data Primer**

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumbernya tanpa perantara (Uyuni, 2023). Data tersebut didapatkan dari hasil wawancara dan observasi langsung dengan informan yang relevan dengan variabel yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari hasil wawancara langsung bersama informan.

##### **2.3.2 Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari sumber pertama dan telah tersusun dalam bentuk dokumen tertulis (Hidayat, 2022). Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari

hasil studi kepustakaan, dimana metode pencarian data melalui pencarian, pengumpulan, dan analisis sumber data dari studi kepustakaan.

## 2.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis akan terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid sehingga menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Wawancara ( Interview ), yaitu melakukan wawancara langsung kepada responden untuk mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan dengan panduan atau daftar pertanyaan.(Helviani, Kasmin, Juliatmaja, Nursalam, & Syahrir, 2021). Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai pandangan, pengalaman, atau pendapat seseorang. Prosesnya dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada responden dan mendengarkan jawaban yang diberikan, baik dengan format pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya maupun yang lebih fleksibel. Adapun informan yang terlibat dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa segmen yang paling signifikan dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu 2024 di kecamatan Polewali, yaitu :

- i. Pemilih Pemula

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) rentang umur 17-24 dalam daftar pemilih tetap (DPT) pemilu 2024 sebanyak 81.568 atau sekitar 23% dari total daftar pemilih Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024, jumlah pemilih dari tetap di Kabupaten Polewali Mandar. Meskipun data ini tidak merinci jumlah pemilih di setiap kecamatan, khususnya di Kecamatan Polewali, segmen ini tetap relevan sebagai informan dalam penelitian ini, mengingat jumlah partisipasi mereka yang sangat signifikan di wilayah ini. Adapun informan pada segmen ini yaitu 10-12 Orang.

**Gambar 2. Klasifikasi Umur dan Generasi dalam DPT Pemilu 2024 Kabupaten Polewali Mandar**



## ii. Perempuan

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024, jumlah pemilih perempuan di Kecamatan Polewali sebanyak 24.385 atau sekitar 51% dari total daftar pemilih tetap. Jumlah yang dominan ini menjadikan mereka kelompok yang sangat signifikan dan strategis untuk memahami persepsi masyarakat tentang keterlibatan perempuan di pemilihan legislatif. Adapun jumlah informan pada segmen ini yakni 8-10 informan.

**Gambar 3. Rekapitulasi DPT Kabupaten Polewali Mandar**

No.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	Jumlah TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L + P
1.	ALLU	8	31	5,256	5,306	10,562
2.	ANREAPI	5	23	4,312	4,052	8,364
3.	BALANIPA	11	48	10,247	10,665	20,912
4.	BINUANG	10	66	14,340	14,325	28,665
5.	BULO	9	25	3,955	3,810	7,765
6.	CAMPALAGIAN	18	101	22,498	23,311	45,809
7.	LIMBORO	11	44	6,754	7,297	14,051
8.	LUYO	11	51	11,956	11,923	23,879
9.	MAPILLI	12	58	11,986	12,333	24,319
10.	MATAKALI	7	43	9,923	10,184	20,107
11.	MATANGGA	7	13	2,249	2,106	4,355
12.	POLEWALI	9	93	22,931	24,385	47,316
13.	TAPANGO	14	43	9,548	9,555	19,103
14.	TINAMBUNG	8	38	8,508	9,084	17,592
15.	TUTAR	13	51	8,332	8,111	16,443
16.	WONOMUYO	14	78	18,568	19,573	38,141
	<b>TOTAL</b>	<b>167</b>	<b>806</b>	<b>171,363</b>	<b>176,020</b>	<b>347,383</b>

## iii. Petani/Nelayan

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar, sektor pertanian dan perikanan merupakan sumber penghasilan utama masyarakat di Kecamatan Polewali. Petani dan Nelayan menjadi kelompok mayoritas di kecamatan ini sehingga dipilih menjadi informan dalam penelitian ini karena jumlah mereka yang signifikan di kecamatan ini. Adapun jumlah informan pada segmen ini yakni 5-6 informan.

**Gambar 4. Jumlah Petani di Kabupaten Polewali Mandar tahun 2023**



**Gambar 5. Jumlah Rumah Tangga Perikanan berdasarkan Kecamatan**



Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Perikanan
Campalagian	906	657
Luyo	20	20
Wonomulyo	152	1.368
Mapilli	309	275
Tapango	9	111
Matakali	3	557
Bulo	1.060	48
Polewali	1.289	624
Binuang	3	902
Anreapi	2	86
Matangnga	-	64

2. Metode Observasi ( Pengamatan ), pengamatan dilakukan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang valid dan terpercaya. Proses ini memanfaatkan berbagai alat modern, sehingga memungkinkan untuk mengamati objek yang sangat kecil maupun yang kurang jelas.
3. Metode Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan penelusuran informasi historis atau catatan peristiwa yang telah terjadi. Dokumen yang digunakan bisa berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari individu tertentu. Contoh dokumen dalam bentuk tulisan termasuk catatan harian.

## 2.5 Analisis Data

Riset ini menerapkan metode penelitian kualitatif, yang berfokus pada pengumpulan data secara deskriptif untuk memahami fenomena sosial yang sedang diteliti. Penelitian ini akan mencakup penjelasan baik secara lisan maupun tulisan dari para informan. Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis data kualitatif sebagai berikut :

1. Reduksi data, merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.
2. Penyajian data, adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif, matriks, grafik, dan bagan.
3. Penarikan kesimpulan, merupakan hasil analisis yang digunakan untuk mengambil tindakan.